

****



**PETUNJUK TEKNIS**

**PENENTUAN LOKASI DAN PENERIMA MANFAAT**

DAFTAR ISI

[I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PETUNJUK TEKNIS 3](#_Toc81979291)

[Latar Belakang 3](#_Toc81979292)

[Tujuan 4](#_Toc81979293)

[Daftar Istilah 5](#_Toc81979294)

[TAHAP I. Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Program APP 5](#_Toc81979295)

[Tujuan Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Program APP 5](#_Toc81979296)

[Kriteria Lokasi Kabupaten 5](#_Toc81979297)

[Kriteria Lokasi Kecamatan dan Desa 6](#_Toc81979298)

[Mekanisme Penentuan Lokasi 6](#_Toc81979299)

[TAHAP II. Penentuan Penerima Manfaat 6](#_Toc81979300)

[Tujuan Identifikasi Penerima Manfaat 6](#_Toc81979302)

[Kriteria Penerima Manfaat 7](#_Toc81979303)

[Mekanisme Penentuan Penerima Manfaat 7](#_Toc81979304)

[KETENTUAN PENYUSUNAN PROPOSAL 9](#_Toc81979305)

[TAHAP I. Penentuan Usaha (Riset Komoditas) 10](#_Toc81979307)

[TAHAP II. Studi Kelayakan Usaha 13](#_Toc81979308)

[Sistematika Proposal 18](#_Toc81979309)

[Mekanisme Pengajuan Proposal 20](#_Toc81979310)

[Verifikasi Proposal 21](#_Toc81979311)

[Penyaluran Dana 21](#_Toc81979312)

[Tujuan Pemantauan, Pengukuran Hasil, dan Pelaporan 23](#_Toc81979313)

[Pemantauan 25](#_Toc81979314)

[**Tujuan Pemantauan** 26](#_Toc81979315)

[**Mekanisme Pemantauan** 26](#_Toc81979316)

[Pengukuran Hasil 26](#_Toc81979317)

[**Tujuan Pengukuran Hasil** 27](#_Toc81979318)

[**Mekanisme Pengukuran hasil** 27](#_Toc81979319)

[Indikator Keberhasilan 27](#_Toc81979320)

# LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PETUNJUK TEKNIS

Dijelaskan pada pedoman umum bahwa tahapan yang lebih spesifik dari penentuan lokasi dan penerima manfaat dijelaskan dalam petunjuk teknis. Berikut merupakan petunjuk teknis yang meliputi tahapan-tahapan penting dalam memunculkan nama lokasi penerima program APP sekaligus kelompok penerima manfaatnya.

## Latar Belakang

Disusunnya desain ulang pedoman umum APP merupakan langkah pemerintahan provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan daya jangkau kelompok miskin yang bisa memanfaatkan program. Adapun perbedaan mendasar dari desain ulang pedoman umum APP yaitu penggunaan pendekatan keperantaraan pasar yang dijelaskan sebagai sebuah pendekatan pengembangan UMK yang bertujuan menciptakan akses pasar baru atau memperkuat yang sudah ada dalam bentuk model bisnis diantara UMK, Mitra Lokal, dan Mitra Swasta yang mencakup transaksi jual beli, jasa, dan investasi, yang pada akhirnya menghasilkan kenaikan pendapatan bagi UMK dan kenaikan omzet serta keuntungan bagi para mitra[[1]](#footnote-1).

Dalam kaitannya dengan program APP yang mengadopsi pendekatan keperantaraan pasar memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) Pemilihan melalui proses seleksi yang sistematis dengan kriteria, pembobotan, dan penilaian yang terukur, serta sumber data yang kredibel; 2) Analisis dilakukan secara terstruktur meliputi kondisi dan tren pasar, pemetaan rantai nilai, dan identifikasi permasalahan beserta akar penyebabnya pada sistem Pasar; 3) Intervensi direncanakan bersama oleh mitra perantara, perwakilan kelompok sasaran, dan mitra swasta (off-takers) dengan dukungan operator Keperantaraan; 4) Intervensi menciptakan model bisnis yang menjawab akar penyebab pada fungsi rantai nilai, pendukung dan lingkungan bisnis; 5) Bantuan spesifik sesuai kebutuhan pengembangan model bisnis, misalnya temu usaha untuk pembentukan jejaring rantai pasok, pengenalan SOP pemantauan kualitas, fasilitasi pendanaan oleh lembaga keuangan; 6) Kebersinambungan solusi dijamin oleh model bisnis yang saling menguntungkan secara komersiil; 7) Biaya dan risiko ditanggung bersama oleh pemerintah, UMK, mitra lokal, dan mitra swasta (*off-takers*).

Pedoman umum APP yang menggunakan pendekatan keperantaraan pasar memerlukan beberapa kondisi yang perlu dipenuhi dalam penerapannya, seperti: 1) Membangun rantai dan jejaring usaha dengan prinsip-prinsip keperantaraan pasar; 2) Peningkatan kapasitas usaha melalui inkubasi dan pendampingan bisnis; dan 3) Fasilitas stimulan produktif.

Disebutkan dalam pedoman umum bahwa penentuan lokasi dan penerima manfaat menjadi tahap awal dalam mekanisme pelaksanaan APP yang sesuai sasaran dan berpeluang untuk berkelanjutan. Dalam petunjuk teknis berikut akan diuraikan tahap penentuan lokasi dan mengidentifikasi penerima manfaat.

## Tujuan

1. Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara spesifik terkait penentuan lokasi implementasi APP.
2. Memahamkan kelompok kerja APP untuk bisa mengidentifikasi penerima manfaat dari lokasi terpilih.

## Daftar Istilah

|  |  |
| --- | --- |
| Penanggulangan Kemiskinan | Seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. |
| *Anti-Poverty* Program (APP) | Salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat miskin melalui pendekatan berbasis klaster. |
| Pemberdayaan Usaha | Upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. |
| Kelompok masyarakat miskin produktif | Kumpulan masyarakat di suatu wilayah yang masuk dalam klasifikasi miskin dan masih memiliki sumberdaya untuk diberikan pemberdayaan usaha. |
| Intervensi | Upaya sistematis untuk mengatasi suatu akar permasalahan dengan mendorong perubahan perilaku pada tingkatan pelaku pasar untuk mencapai hasil pada tingkatan penerima manfaat melalui penciptaan suatu model bisnis. |
| Stakeholder | Pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan |
| Desil 2 | Rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah |
| Desil 3 | Rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah |
| UMK  | Usaha Mikro dan Kecil. |
| UMKM | Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. |

# TAHAP I. Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Program APP

## Tujuan Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Program APP

1. Menentukan wilayah kabupaten, kecamatan, desa yang menjadi lokasi program APP.

## Kriteria Lokasi Kabupaten

1. Lokasi program APP berada di Kabupaten wilayah Provinsi Jawa timur.
2. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi atau wilayah kantong kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Lokasi Kabupaten diprioritaskan untuk wilayah kantong kemiskinan dan terbuka bagi Kabupaten lain dengan komitmen mengadopsi program APP.

## Kriteria Lokasi Kecamatan dan Desa

1. Kriteria lokasi kecamatan dan desa diprioritaskan pada kecamatan dan desa dengan jumlah penduduk miskin terbanyak sesuai dengan kriteria dalam DTKS.
2. Lokasi kecamatan dan desa ditetapkan oleh Pokja APP Kabupaten.
3. Lokasi Kecamatan dan desa sejalan dengan kriteria seleksi komoditas melalui riset komoditas dan kelayakan usaha.
4. Lokasi kecamatan dan desa yang dipilih terbuka untuk lokasi yang sudah menjadi sasaran pogram lain terkait pembangunan ekonomi oleh Kementrian, BUMN, dan Mitra Pembangunan lainnya.
5. Lokasi kecamatan dan desa di tetapkan oleh pemerintah kabupaten.

## Mekanisme Penentuan Lokasi

1. Penentuan lokasi kabupaten dilakukan melalui koordinasi antara koordinator APP Provinsi, Bappeda, dan OPD yang lain dengan berbasis data
2. Kabupaten yang tidak termasuk dalam prioritas kantong kemiskinan akan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan oleh provinsi.
3. Penentuan lokasi kecamatan dan desa melalui koordinasi antara Pokja APP Kabupaten, OPD terkait, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.

# TAHAP II. Penentuan Penerima Manfaat

## Program APP Provinsi Jawa Timur merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat. Dimana manfaat program yang diberikan adalah program bantuan non-tunai. Manfaat program APP ini nantinya menyasar pada dua kelompok sasaran utama yaitu kelompok masyarakat miskin yang produktif di desil 2 dan desil 3 (terutama desil 2) pada sektor/bidang pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian dan perdagangan, perkebunan, koperasi, usaha mikro dan kecilTujuan Penentuan Lokasi Prioritas Intervensi Program APP.

## Tujuan Identifikasi Penerima Manfaat

1. Menguraikan kategori penerima manfaat yang akan menerima bantuan program APP dan bagaimana mekanismenya.
2. Memberikan gambaran kriteria yang tepat untuk menentukan siapa yang paling tepat menerima bantuan program APP.

## Kriteria Penerima Manfaat

1. Terdapat 2 kategori penerima manfaat yaitu penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Penerima manfaat langsung adalah masyarakat miskin yang mendapatkan pendanaan program APP. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan tetapi terlibat dalam aktifitas program APP.
2. Kriteria penerima manfaat langsung adalah masyarakat miskin yang produktif di desil 2 dan desil 3 (prioritas desil 2) pada sektor/bidang pertanian, peternakan, perikanan, perhutanan, perindustrian dan perdagangan, perkebunan, koperasi, usaha mikro dan kecil berdasarkan data DTKS.
3. Penerima manfaat langsung dapat berupa kelompok usaha, kelompok masyarakat (POKMAS), kelompok bidang perikanan, kelompok bidang pertanian, Koperasi, atau Organisasi Pemasyarakatan bidang ekonomi lainnya.

## Mekanisme Penentuan Penerima Manfaat

1. Seleksi penerima manfaat dilakukan oleh jajaran pemerintahan desa melalui mekanisme musyawarah desa.
2. Seleksi penerima manfaat harus sejalan dengan kriteria pemilihan komoditas melalui riset komoditas dan kelayakan usaha.
3. Seleksi penerima manfaat yang dipilih terbuka untuk masyarakat miskin yang sudah menjadi sasaran pogram lain terkait pembangunan ekonomi oleh Kementrian, BUMN, dan Mitra Pembangunan lainnya.
4. Seleksi penerima manfaat ditentukan melalui koordinasi antara Pokja APP Kabupaten, OPD terkait, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa.
5. Penerima manfaat terbuka untuk kelompok perempuan dan disabilitas.
6. Tata cara seleksi penerima manfaat langsung diatur dalam Peraturan Gubenur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Panatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
7. Penerima manfaat tidak langsung tidak hanya masyarakat miskin yang ada di lokasi penerima manfaat, melainkan berbagai pihak yang terlibat dalam model bisnis. Seperti BUMDes/Koperasi, Lembaga Penyalur, dan Lembaga Keuangan yang berada dalam rantai nilai usaha pokmas dan sesuai kebutuhan.



**PETUNJUK TEKNIS**

**PENYUSUNAN PROPOSAL**

# KETENTUAN PENYUSUNAN PROPOSAL

**Ketentuan Umum**

1. Proposal yang dimaksud dalam Juknis adalah Proposal Besar APP di tingkat Kabupaten yang menaungi kegiatan APP dengan mengadopsi keperantaraan pasar.
2. Proposal bantuan hibah POKMAS adalah bagian dari aktivitas yang dirancang dalam Proposal Besar APP di tingkat Kabupaten.

**Ketentuan Khusus**

1. Proposal disusun oleh Pokja APP Kabupaten dengan Asistensi dari Tim Pembina APP Provinsi.
2. Proposal berisi pemetaan menyeluruh untuk rencana usaha POKMAS.
3. Proposal disusun untuk menaungi program APP secara *Multi years* di tingkat Kabupaten dan berlaku selama 3 tahun.
4. Proposal disusun mengkuti sistematika proposal dalam Juknis.
5. Proposal disusun setidaknya dalam waktu enam bulan
6. Penyusunan proposal Kabupaten dapat dibantu oleh tenaga ahli
7. Proposal pengajuan bantuan POKMAS diajukan setelah proposal besar APP di tingkat Kabupaten disetujui oleh Pemerintah Provinsi.

# Langkah Penyusunan Proposal

1. Memilih usaha yang akan dikembangkan ( Riset Komoditas) .
2. Studi Kelayakan (Perencanaan intervensi, pemantauan dan pengukuran hasil, Rencana Pembiayaan)
3. Penulisan Proposal

#

# TAHAP I. Penentuan Usaha (Riset Komoditas)

Pemilihan komoditas dilakukan agar sumberdaya dapat terfokus pada komoditas yang paling potensial yaitu komoditas yang memiliki potensi paling besar untuk meningkatkan pendapatan penerima manfaat (rumah tangga miskin) dalam skala yang memadai dan dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Komoditas yang dipilih, dilakukan analisis agar intervensi keperantaraan pasar yang akan dilakukan relevan dengan kondisi riil dari permasalahan yang dihadapi pelaku pasar, dengan rantai nilai dan sistem pasar dari komoditas tersebut.

**Langkah 1. Seleksi Komoditas**

Seleksi Komoditas dilakukan berdasarkan kriteria yang mencerminkan potensi pertumbuhan, potensi adanya kerjasama dengan sektor swasta dan potensi jumlah penerima manfaat dalam hal ini kelompok masyarakat miskin yang terlibat dalam rantai komoditas terpilih.

Tujuan dari seleksi komoditas adalah terpilihnya satu komoditas yang akan dijadikan peluang usaha.

Adapun proses pelaksanaan seleksi komoditas sebagai berikut:

1. Penetapan Kriteria.
2. Kriteria untuk pemilihan komoditas adalah sebagai berikut:
* Potensi daya jangkau kelompok miskin (*poverty outreach*): berapa banyak kelompok miskin yang menanam, memproduksi atau mengolah komoditas.
* Potensi peningkatan pendapatan kelompok miskin (*income impact*): berapa besar potensi pertumbuhan komoditas di masa mendatang.
* Potensi perubahan sistemik pada sistem pasar (*systemic change*): berapa besar potensi untuk bekerjasama dengan para pelaku yang ada dalam sistem pasar dari komoditas.
* Kriteria penting lainnya seperti lingkungan hidup, gender, prioritas pembangunan: berapa besar dampak dari komoditas terhadap lingkungan hidup, kesetaraan gender atau kesesuaiannya dengan pencapaian prioritas pembangunan atau pembangunan daerah.
1. Penilaian per kriteria dilakukan dengan pembobotan dengan ketentuan:
* Besarnya bobot ini mencerminkan tingkat prioritas bobot tersebut.
* Pembobotan dilakukan dengan menggunakan skala 1-5
* Berdasarkan hasil penilaian pembobotan, ditentukan 3-4 komoditas potensial berdasarkan data umum mengenai komoditas unggulan.
1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam langkah sebelumnya, antara lain:

1. Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain dari Provinsi Dalam Angka, Kabupaten Dalam Angka, Statistik Pertanian, Statistik Perdagangan, maupun kemiskinan.
2. Jika diperlukan, dapat juga mengumpulkan data primer seperti wawancara pelaku pasar (petani, pedagang, kios pertanian, industri, dll) maupun lembaga terkait lainnya (pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga nirlaba, dll).
3. Penentuan Peringkat dan Pengambilan Keputusan

Penentuan peringkat pada dasarnya adalah pembandingan dari komoditas-komoditas yang masuk dalam proses seleksi. Jika ada pertimbangan lain, dapat didiskusikan dan disepakati oleh para pihak dengan alasan yang obyektif dan masuk akal.

**Langkah 2. Analisis Komoditas**

Seringkali program pengembangan ekonomi menjadi tidak efektif dan bisa merugikan karena lebih banyak fokus pada pengembangan produksi komoditas dan tidak memperhatikan aspek pasar sehingga kenaikan produksi tidak terjual atau justru harga menjadi jatuh karena kelebihan produksi.

Tujuan dari analisis komoditas adalah terkumpulnya informasi dan terpilihnya area intervensi.

Adapun tahapan analisis komoditas adalah:

1. Pembuatan Profil Komoditas dan Pemetaan Pasar

Pemetaan pasar komoditas terpilih terdiri dari:

1. Fungsi rantai nilai dan pelaku antara lain:
* Fungsi rantai nilai dimulai dari kegiatan paling hulu yaitu produksi sampai dengan kegiatan paling hilir yaitu konsumsi yang ditandai dengan adanya transaksi (perpindahan barang/jasa dan uang) antar para pelaku sepanjang rantai nilai.
* Para pelaku dari setiap mata rantai tersebut yang ada di lokasi (kabupaten) maupun di luar lokasi yang terhubung dengan pelaku di lokasi.
* Estimasi atas jumlah pelaku dari setiap mata rantai.
1. Fungsi pendukung yang terdiri atas:
* Fungsi yang mendukung transaksi komoditas yang sudah dipetakan dalam fungsi rantai nilai sebelumnya.
* Para pelaku dari fungsi pendukung tersebut yang ada di lokasi (kabupaten) maupun di luar lokasi.
1. Fungsi lingkungan bisnis yang terdiri atas:
* Kebijakan, peraturan atau kebiasaan/budaya yang mempengaruhi secara luas terjadinya transaksi dalam fungsi rantai nilai yang sudah dipetakan sebelumnya.
* Para pelaku dari fungsi lingkungan bisnis tersebut. Pelaku utama dari fungsi ini adalah pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
1. Daftar pertanyaan untuk mengumpulkan infromasi antara lain:
* Terkait sejauh mana komoditas unggulan menjadi sumber penghasilan bagi petani untuk menilai komitmen petani dalam peningkatan daya saing komoditasnya: Apakah petani bergantung sepenuhnya pada komoditas tersebut? Apakah petani memiliki sumber penghasilan lain?Siapa saja yang terlibat dalam budi daya komoditas?
* Terkait peran perempuan. Tingkat keterlibatan perempuan dalam kegiatan budi daya. Tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumberdaya:
1. Menentukan sejumlah rumah tangga terkait komunitas terpilih (10 – 30 rumah tangga) untuk diwawancarai
2. Mewawancarai rumah tangga komunitas terpilih yang dihadiri oleh kepala rumah tangga dan istri/suami

# TAHAP II. Studi Kelayakan Usaha

**Langkah 1. Perencanaan Intervensi**

Akar permasalahan yang telah diidentifikasi dalam tahap sebelumnya akan dijawab melalui intervensi. Intervensi pada dasarnya adalah upaya untuk mengatasi suatu akar permasalahan dengan mendorong perubahan pada tingkatan pelaku pasar untuk mencapai hasil pada tingkatan penerima manfaat melalui suatu model bisnis.

Model bisnis menggambarkan interaksi antara Mitra Swasta, Mitra lokal, dan penerima manfaat dalam pertukaran barang atau jasa dan uang.

Kalkulasi bisnis adalah perhitungan sederhana untuk mengkaji bagaimana dampak inovasi atau model bisnis yang baru atas pendapatan dan biaya Mitra Swasta, Mitra lokal, dan penerima manfaat; apakah ada tambahan keuntungan bersih dan berapa jumlahnya.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rencana intervensi.

1. Penyusunan Rencana Intervensi

Bagian ini akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan Rencana Intervensi yang bertujuan untuk mematangkan dan mengkonkritkan ide/ konsep intervensi.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rencana intervensi.

1. Perumusan intervensi dan logika intervensi

Penggalian akar masalah di area intervensi

* Permasalahan diarea intervensi disusun dalam bentuk pernyataan masalah atau problem statement.
* Penggalian penyebab melalui pohon masalah (problem tree) dengan mengajukan pertanyaan “mengapa” atas pernyataan masalah. Jawaban dari pertanyaan ini adalah penyebab pada lapis pertama.
* Akar permasalahan mana yang akan ditangani oleh intervensi harus ditentukan karena ada kemungkinan akan ditemukan beberapa akar masalah
* Akar permasalahan yang telah dipilih menjadi suatu pernyataan yang menggambarkan bentuk kegiatan konkret yang akan dilakukan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pemasalahan** | **Penyebab****(Akar Masalah)** | **Intervensi** | **Mitra Potensial** |
| Permasalahan 1:...Mengapa .....Mengapa ..... |  |  |  |
| Permasalahan 2 : ...Mengapa .....Mengapa ..... |  |  |  |
| Permasalahan 3:...Mengapa .....Mengapa ..... |  |  |  |
| dst |  |  |  |

1. Menyusun logika intervensi
* Penyusunan logika intervensi dimulai dari pernyataan intervensi yang telah diformulasikan sebelumnya.
* Menentukan dampak berupa perubahan yang diharapkan dari intervensi tersebut di tingkat pelaku pasar.
* Menentukan dampak selanjutnya berupa perubahan yang diharapkan pada tingkat penerima manfaat terkait adanya perbaikan akses dan/atau pertumbuhan.
* Menentukan dampak selanjutnya berupa hasil yang diharapkan pada tingkat penerima manfaat.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kerangka Strategi** | **Keterangan** |
| Pengurangan Kemiskinan | Apa dampak perubahan di tingkat penerima manfaat? |
| Perbaikan Akses dan Pertumbuhan | Perubahan apa yang diharapkan terjadi di tingkat penerima manfaat? |
| Perubahan Sistem Pasar | Perubahan apa yang diharapkan terjadi di pasar? |
| Intervensi | Apa yang akan dilakukan |

1. Membuat model bisnis, kalkulasi bisnis, dan target hasil

Penyusunan model bisnis baru

* Akar permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, formulasi intervensi serta model bisnis yang ada saat ini
* Model bisnis harus membawa untuk menjawab akar permasalahan
* mengidentifikasi calon mitra lokal yang ada saat ini dan melakukan penilaian bagaimana mereka dapat menjadi bagian dari model bisnis yang baru
* Pastikan bahwa akan ada keuntungan lebih besar yang akan diperoleh para pihak yang akan terlibat dalam model bisnis baru melalui kalkulasi bisnis

**Gambar 1. Model Bisnis Program APP Sebelumnya**

****

**KONSUMEN AKHIR**

**PEDAGANG**

**POKMAS**

**Gambar 2. Model Bisnis Baru desain ulang APP**

****

**PRODUSEN LAINNYA**

**OFFTAKER**

**BUMDES/KOPERASI**

**POKMAS**

* Estimasi penghitungan potensi pendapatan yang akan diterima dan biaya yang harus dibayar oleh pelaku pasar di sepanjang rantai nilai
* Membandingkan potensi pendapatan dan biaya tersebut di atas dengan pendapatan dan biaya yang diperoleh oleh masing-masing pihak tersebut pada saat ini
* Memastikan bahwa ada keuntungan lebih besar yang akan diperoleh para pihak dibanding kondisi saat ini
1. Menyusun garis besar rencana implementasi
* Memperkirakan hal-hal (input) yang dibutuhkan untuk mengadopsi bisnis model
* Mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan berdasarkan kebutuhan
* Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan ini akan membawa perubahan sesuai dengan logika intervensi yang telah disusun
* Mengeksplorasi potensi pembiayaan
1. Identifikasi dan Negosiasi dengan Calon Mitra

Setiap intervensi memerlukan mitra yang merupakan pelaku yang ada di dalam sistem pasar. Kunci utama untuk mendapatkan mitra potensial adalah insentif yang menarik.

Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah terpilihnya mitra swasta.

1. Identifikasi calon mitra
* Mencari informasi dari pemangku kepentingan dan media di daerah intervensi
* Mempersiapkan usulan kerjasama
* Melakukan kontak dengan beberapa calon mitra
* Jika ada lebih dari satu calon mitra, perlu membandingkan sesuai dengan insentif dan kontribusi
1. Negosiasi dengan calon mitra
* Mempersiapkan usulan kerjasama yang lebih konkret
* Mengajukan usulan kerjasama
* Negosiasi terus dilakukan sampai dicapai kesepakatan
* Jika kesepakatan telah dicapai, tuangkan kesepakatan dalam dokumen kerjasama

**Langkah 2. Rencana Pemantauan dan Pengukuran Hasil**

**Mengembangkan Rantai Kegiatan dan Indikator**

Rantai hasil memperlihatkan bagaimana kegiatan pada akhirnya menuju dampak yang diinginkan dari intervensi (contohnya sebuah sektor yang lebih kompetitif, peningkatan pendapatan petani dan kemungkinan tujuan lainnya tergantung pada keseluruhan tujuan projek anda). Setiap intervensi akan menyebabkan perubahan disetiap tingkatan yang berbeda termasuk rantai hasil, satu perubahan mendorong perubahan lainnya.

Rantai hasil dapat diartikulasikan melalui diagram sederhana untuk membantu tim pelaksana menggambarkan dengan realistis apa yang mereka lakukan dan mengapa; bagaimana pekerjaan individu bisa membantu mencapai dampak pembangunan; dan menyediakan dasar untuk menilai jika dan untuk seberapa jauh perubahan tersebut terjadi.

**Langkah 3. Rencana Pembiayaan**

**Tahapan ini akan dibahas di dalam “Juknis Seleksi Proposal dan Pembiayaan”**

#

# Sistematika Proposal

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang Intervensi
	1. Ringkasan Profil Komoditas
	2. Pembenaran untuk Intervensi yang Dipilih
3. Penjelasan Intervensi
	1. Area Intervensi dan Masalah-masalah yang Berkaitan
	2. Penyebab Dasar atau Tantangan Sistematik yang Dipecahkan
4. Model Bisnis
	1. Peran Mitra Swasta/ Pasar yang Diharapkan
	2. Model Bisnis
5. Mitra Intervensi dan Kesepakatan
	1. Seleksi Mitra Intervensi
	2. Tujuan dan Kerjasama
	3. Pasar atau Potensi Produksi
	4. Pendapatan Tambahan Bersih untuk Pelaku Pasar
6. Rantai Hasil dan Indikator
	1. Rantai Hasil
	2. Indikator
7. Strategi Pejangkauan, Perluasan, dan Keberlanjutan
8. Rencana Pelaksanaan Monev
9. Perkiraan Biaya
10. Lampiran

Lampiran 1: Rancangan Intervensi

Lampiran 2: Jumlah Total Proyeksi Bisnis di Wilayah Target

Lampiran 3: Profitabilitas POKMAS

Lampiran 4: Profitabilitas Mitra Sektor Swasta

Lampiran 5: Perhitungan Penjangkauan

Lampiran 6: Rencana Pelaksanaan Detil

Lampiran 7: Anggaran Detil



**PETUNJUK TEKNIS**

**SELEKSI PROPOSAL DAN PEMBIAYAAN**

# Mekanisme Pengajuan Proposal

1. POKJA APP Kabupaten mengajukan permohonan asistensi penyusunan proposal besar APP Kabupaten kepada Tim Pembina APP Provinsi.
2. Tim Pembina Provinsi menugaskan Tim Asistensi untuk berkoordinasi dengan POKJA APP Kabupaten
3. POKJA APP Kabupaten melakukan penyusunan proposal bersama Tim asistensi Provinsi.
4. POKJA APP Kabupaten mengirim proposal lengkap beserta lampirannya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Tim Pembina APP Provinsi Jawa Timur dalam format cetak atau digital.
5. Proposal bantuan hibah untuk POKMAS diajukan setelah proposal besar APP Kabupaten disetujui oleh Pemerintah Provinsi.
6. Pengajuan Proposal bantuan hibah untuk POKMAS mengikuti prosedur pengajuan yang diatur dalam Pergub Peraturan Gubenur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Panatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

# Verifikasi Proposal

1. Mekanisme verifikasi proposal melalui:
	1. Seleksi administratif yang meliputi kelengkapan dokumen proposal sesuai dengan sistematika poposal dan pengesahannya.
	2. Seleksi substansi yang meliputi hasil riset komoditas, kelayakan usaha dan rancangan intervensi pengembangan usaha POKMAS, kolaboratif program dan dokumen pendukung lainnya
	3. Verifikasi terhadap mitra lokal ( Bumdes/Koperasi) dan mitra swasta (off-taker) untuk memastikan berjalannya intervensi APP.
2. Tim Pembina APP Provinsi melakukan verifikasi proposal.
3. Tim Pembina APP Provinsi menetapkan proposal yang lolos sebagai penerima progam APP Provinsi.

# Penyaluran Dana

1. Jumlah dana yang diberikan untuk pengembangan usaha POKMAS disesuaikan dengan persetujuan proposal dan ketersediaan anggaran.
2. Bantuan hibah untuk POKMAS diberikan dalam bentuk non tunai

Instrument verikasi Proposal

1. Instrumen Administrasi
2. Instrumen substansi



**PETUNJUK TEKNIS**

**PEMANTAUAN, PENGUKURAN HASIL DAN PELAPORAN**

# Tujuan Pemantauan, Pengukuran Hasil, dan Pelaporan

Petunjuk ini menjabarkan bagaimana sistem pengukuran hasil bekerja, tapi bukan berbentuk rangkaian instruksi yang menjelaskan setahap demi tahap. Namun lebih pada memberikan garis besar tentang proses pengukuran hasil yang ada dalam kerangka kerja aspek-aspek kunci di pengelolaan program APP (misalnya, mengembangkan rantai kegiatan, mendefinisikan indikator-indikator, melakukan review dengan menggunakan sistem).

Panduan ini dimaksudkan untuk memandu pelaksana program yang terlibat dalam merancang, melaksanakan dan menilai intervensi-intervensi; panduan ini juga dirancang sedemikian rupa agar pelaksanaan APP sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan petunjuk teknis sebagai acuan dalam pemantauan, pengukuran dan pelaporan program APP.

Tujuan pemantauan dan pengukuran hasil

* Memastikan konsistensi antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan pelaksanaan APP.
* Menyusun indikator kinerja Program APP yang menjadi dasar acuan bagi setiap program Organisasi Perangkat Daerah baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa.
* Memastikan target kondisi di Provinsi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diterjemahkan dan diakomodasikan dalam target-target mikro/teknis setiap program OPD.
* Mewujudkan kepemilikan kolektif publik terhadap program yang dicerminkan melalui kepedulian publik di dalam memantau pengelolaan program secara luas dan konsisten.
* Memastikan respon dan umpan balik pengelola program terhadap pengaduan dan saran publik dilakukan secara cepat dan tepat.
* Mendorong tercapainya tolok ukur kinerja program yang secara kolektif mencapai sasaran Pemerintah Provinsi dalam penanggulangan kemiskinan.

Petunjuk ini menjabarkan bagaimana sistem pengukuran hasil bekerja, tapi bukan berbentuk rangkaian instruksi yang menjelaskan setahap demi tahap. Namun lebih pada memberikan garis besar tentang proses pengukuran hasil yang ada dalam kerangka kerja aspek-aspek kunci di pengelolaan program APP (misalnya, mengembangkan rantai kegiatan, mendefinisikan indikator-indikator, melakukan review dengan menggunakan sistem).

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memandu pelaksana program yang terlibat dalam merancang, melaksanakan dan menilai intervensi-intervensi; panduan ini juga dirancang sedemikian rupa agar pelaksana program dapat menjalankan program APP sesuai dengan pedoman yang disahkan.

Sebagai langkah pertama dalam mengembangkan sebuah sistem pemantauan dan pengukuran hasil, APP telah mengembangkan teori perubahan, yang terlihat dalam rantai kegiatan program APP dibawah ini (Gambar 1).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kerangka Strategi** | **Keterangan** | **Indikator Utama** |
| Pengurangan Kemiskinan | Apa dampak perubahan di tingkat penerima manfaat? | Tercapainya target pengurungan kemiskinan |
| Perbaikan Akses dan Pertumbuhan | Perubahan apa yang diharapkan terjadi di tingkat penerima manfaat? | POKMAS dan masyarakat miskin lainnya mengalami peningkatan pendapatan melalui komoditas usaha yang dikerjakan. |
| Perubahan Sistem Pasar | Perubahan apa yang diharapkan terjadi di pasar? | * Terciptanya akses ke pembeli yang konsisten dan berkelanjutan dan penngkatan produktifitas dan efisiensi.
* Terciptanya skema hubungan bisnis yang berkelanjutan antara POKMAS dan Produsen lainnya dengan BUMDES/Koperasi dan *offtaker*.
 |
| Intervensi | Apa yang akan dilakukan | Menghubungkan POKMAS dan Produsen lainya dengan *Offtaker* yang konsisten melakukan pembelian dan mendorong setiap pelaku untuk mengadopsi praktik yang lebih baik |

#

# Pemantauan

Untuk tujuan pemantauan, fokus utama adalah pengamatan atas terlaksananya kegiatan dan terjadinya perubahan perilaku sebagai hasil dari kegiatan tersebut. Rantai Kegiatan beserta target indikator yang telah ditentukan digunakan sebagai panduan untuk memantau hasil dari implementasi kegiatan intervensi. Rantai Kegiatan juga digunakan untuk mengukur hasil atau dampak (lihat langkah berikutnya) dalam penyusunan Rencana Pengukuran Hasil.

### **Tujuan Pemantauan**

Tujuan utama pemantauan adalah pengamatan atas terlaksananya kegiatan dan terjadinya perubahan sebagai hasil dari kegiatan Program APP.

### **Mekanisme Pemantauan**

1. POKJA APP Kabupaten menunjuk Staf Pemantauan dan Pegukuran Hasil (SPPH – APP Kabupaten) yang bertanggungjawab secara khusus dalam hal pemantauan dan pengukuran hasil program APP.
2. SPPH – APP Kabupaten dan POKJA APP Kabupaten menyusun rencana pemantauan yang terdiri dari
	1. Rantai Kegiatan
	2. Indikator
	3. Metode Pemantauan
	4. Jenis data yanng dibutuhkan
	5. Sumber verifikasi
	6. Penanggungjawab pengumpulan data
	7. Waktu Pengumpulan data
3. SPPH – APP Kabupaten bertanggungjawab mengelola **Dokumen Kendali APP** tingkat kabupaten **dalam format digital** yang disediakan oleh **Unit Pemantauan dan Pengukuran Hasil di tingkat Provinsi** yang berisi seluruh komponen dan tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan pengkukuran hasil.
4. SPPH – APP dan POKJA APP Kabupaten melaksanakan review atas hasil pemantauan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan. Jenis-jenis pertemuan *review* antara lain:
	1. Pertemuan review Bulanan
	2. Pertemuan review triwulan
	3. Pertemuan review semenster
	4. Pertemuan review akhir tahun pertama
	5. Pertemuan review akhir tahun kedua

Rincian mengenai rincian tentang bagaimana mempersiapkan dan mengorganisir pertemuan-pertemuan review disediakan pada LAMPIRAN xx

1. POKJA APP Kabupaten menindaklanjuti hasil review dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait.

# Pengukuran Hasil

Rencana Pengukuran Hasil yaitu dokumen yang memuat rencana dan waktu kegiatan pengukuran, metode pengumpulan data, indikator dan nilai target yang akan diukur. Pengukuran hasil ini dapat menjadi dasar untuk menilai apakah ada perubahan sistemik yang dibawa oleh intervensi.

### **Tujuan Pengukuran Hasil**

Tujuan dari pengukuran hasil adalah untuk memastikan bahwa intervensi memberikan hasil yang

diharapkan.

### **Mekanisme Pengukuran hasil**

1. Staf Pemantauan dan Pegukuran Hasil (SPPH – APP Kabupaten) dan POKJA APP Kabupaten mempersiapkan **Rencana Pengukuran Hasil (RPH)** berdasarkan Rantai Kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Yang memuat antara lain:
	1. Mengacu pada Rantai Kegiatan, menenetukan metode pengumpulan/sumber data untuk setiap indikator.
	2. Menentukan besaran pengumpulan data yang memadai seperti misalnya jumlah pihak yang diwawancarai, jumlah koresponden dalam survei, dan lain sebagainya.
	3. Menetapkan responden yaitu pemberi informasi mengenai intervensi yang akan diwawancara berdasarkan lokasi dilaksanakannya APP
	4. Menentukan Target Nilai yaitu besaran hasil yang menjadi target yang dipandang memadai untuk menciptakan perubahan di tingkat selanjutnya
2. Rencana pengukuran hasil dikembangkan bersama para pemangku kepentingan yang beragam sebagaimana orang-orang yang berbeda akan mampu memberikan kontribusi untuk bagian-bagian yang berbeda.
3. Berdasarkan Rencana Pengukuran Hasil yang telah disusun, Staf Pemantauan dan Pegukuran Hasil (SPPH – APP Kabupaten) dan POKJA APP Kabupaten memastikan bahwa waktu dan sumberdaya yang tersedia cukup untuk melakukan kegiatan pengukuran hasil. Pengukuran hasil tidak hanya melibatkan pengumpulan data, melainkan juga pembersihan data, analisis data, dan penulisan laporan.
4. SPPH – APP Kabupaten dan POKJA APP Kabupaten dapat dibantu dengan tenaga ahli jika memungkinkan untuk melakukan pengukuran hasil berdasarkan Rencana Pengukuran Hasil yang telah disusun.

#

# Indikator Keberhasilan

Merupakan perangkat pengukuran sejauh mana aktivitas **pemberdayaan ekonomi masyarakat** telah menjadi bagian dari seluruh proses pengelolaan program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Berbagai rangkaian kegiatan Program APP tersebut pada akhirnya bermuara pada tujuan umum program yaitu mempercepat pengurangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan ekonomi. Secara rinci penjelasan indikator keberhasilannya dapat dijelaskan pada table sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema | Penjelasan | Indikator |
| 1. Tenaga Kerja
 | Akses pada kesempatan kerja yang layak (kuantitas dan kualitas) | Jumlahpekerja, jumlahsupplier, jam kerja |
| 1. Kinerja Usaha
 | Kinerja bisnis secara keseluruhan untuk petani(supplier), BUMDes, maupun off-takers | Jumlahproduksi, pesanan, pasar utama, hargajual, produktivitas, aset, keuntungan |
| 1. Pendapatan dan Konsumsi
 | Perubahan jumlah dan alokasi pendapatan serta konsumsi | Jumlah pendapatan, proporsi pendapatan dalam Rumah Tangga dari berbagai sumber, alokasi belanja Rumah Tangga(% konsumsi makanan, pendidikan dan kesehatan, transportasi/komunikasi, keperluan rumah, transfer, lainnya) |
| 1. Peluang Ekonomi
 | Dampak penciptaan peluang ekonomi lokal | Migrasi masuk dan keluar di rumah tangga |
| 1. Akses Jaringan dan Partisipasi
 | Dampak terhadap perluasan akses, jaringan dan partisipasi | Pendidikan/ pelatihan usaha, penggunaan telepon genggam, kepemilikan produk keuangan(tabungan/pinjaman), penyelenggaraan fora berbagipengetahuan, akses terhadap bantuan sosial(BPJS TK, Kesehatan, bansoslainnya) |
| 1. Persepsi dampak
 | Persepsi dampak dari stakeholder | Persepsi peningkatan pendapatan, pengetahuan, kemampuan, keuntungan, dampak sosial lainnya |

**Tim Pembina Program APP Provinsi**

Penanggungjawab koordinasi, pemantauan dan evaluasi adalah Bappeda Provinsi

* Menyusun pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program APP.
* Memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program APP.
* Merumuskan berbagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan program dan keberlanjutan.
* Menindaklanjuti berbagai penyesuaian program yang dianggap perlu dilakukan saat program berjalan.
* Mengembangkan sistem pengelolaan informasi untuk mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program APP.
* Menyampaikan laporan kemajuan kepada Pimpinan Eksekutif dan Legislatif.

**Tim Koordinasi Program APP Kabupaten/Kota**

* Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program APP pada skala Kabupaten/Kota.
* Menyampaikan laporan kemajuan hasil evaluasi program serta hasil pemeriksanaan kepada Bupati dan Pemerintah dan Provinsi.
* Membentuk unit pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program
* Memastikan pelaksanaan Program APP dilaksanakan sesuai panduan.

**LAMPIRAN AGENDA PERTEMUAN REVIEW HASIL PEMANTAUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Jenis Pertemuan Review | Pertemuan Review Bulanan |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari |  |
| Peserta | Dipimpin Oleh | Koordinator POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | TPPH – APP , KTK / Operator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | Analisa awal tentang kemajuan kegiatan-kegiatan sampai saat ini: * Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
 |
| Agenda | * Memaparkan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan sampai hari ini.
* Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
* Apa saja tantangan dan perubahan kunci yang ada dalam intervensi?
* Apa yang perlu diperbaiki?
* Review dan revisi rencana kegiatan sesuai kebutuhan.
 |
| Keputusan kunci | Penyesuaian terhadap kegiatan atau strategi intervensi.  |
| Output yang diharapkan | Laporan bulanan.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipe | Pertemuan Review Triwulan |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari |  |
| Peserta | Dipimpin oleh | Koordinator POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta | SPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi, Unit Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, KTK / Operator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Memperbaharui hasil-hasil yang telah dicapai ke dalam **Dokumen Pemantauan**.
* Analisa awal tentang hasil-hasil yang diperoleh sampai saat ini bersama dengan rantai kegiatan:
	+ Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
	+ Apa yang menyebabkan perubahan yang diamati terjadi?
 |
| Agenda | * Memaparkan kemajuan sampai hari ini dalam rantai kegiatan
* Seperti apa perubahan-perubahan yang telah terjadi?
* Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
* Me-review asumsi-asumsi yang mendasari logika rantai kegiatan.
* Apa saja *lessons learned* kunci yang diperoleh?
* Apa saja yang perlu diperbaiki?
* Perubahan-perubahan apa yang perlu dilakukan terhadap rantai kegiatan?
* Review dan revisi **Dokumen Pemantauan** apabila diperlukan.
 |
| Keputusan kunci | Penyesuaian terhadap intervensi dan Dokumen Pemantauan |
| Output yang diharapkan | Memperbaharui **Dokumen Pemantauan.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Tipe | Pertemuan Review Tengah Tahun / Semester |
| Lama Waktu Review | Setengah Hari |  |
| Peserta | Dipimpin oleh | POKJA APP Kabupaten |
|  | Peserta |  SPPH – APP , OPD Pengampu yang membidangi propovinsi dan kabupaten, Unit Pemantauan dan Pengukuran Hasil Provinsi, KTK / Operator Keperantaraan, Pendamping Kelompok Masyarakat |
| Input | * Memperbaharui hasil-hasil yang diperoleh saat ini ke dalam Dokumen Pemantauan.
* Analisa pendahuluan tentang hasil yang diperoleh saat ini selama rantai kegiatan intervensi berlangsung:
	+ Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik dan mengapa?
	+ Dari pengamatan yang dilakukan, apa yang mungkin menyebabkan perubahan-perubahan tersebut terjadi?
* Analisa pendahuluan tentang kinerja komoditas secara keseluruhan.
* Analisa pendahuluan tentang perubahan sistemik dan kesinambungannya.
 |
| Agenda | * memaparkan kinerja komoditas secara keseluruhan.
* Apa saja perubahan kunci dalam komoditas?
* Bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi strategi dan intervensi komoditas?
* Apa saja pembelajaran kunci yang diperoleh?
* Apakah ada ide-ide intervensi baru yang potensial atau ada kemungkinan mencoba intervensi baru?
* Review dan revisi dokumen pemantauan apabila diperlukan.
 |
| Keputusan kunci |  Membuat prioritas dan mengalokasikan sumberdaya diantara intervensi-intervensi yang ada.  Penyesuaian terhadap intervensi dan dokumen pemantauan.  |
| Output yang diharapkan | Notulen pertemuan review semester  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipe | Pertemuan Review Komoditas akhir tahun pertama  |  |
| Lama Waktu Review | 1-2 hari |  |
| Peserta | Dipimpin oleh |  |
|  | Peserta |  Koordinator Sektor, Intervensi dan RM Salah satu diantara berikut ini: HRM/L, HBEE, HoSP, atau DTL Manajer Propinsi (wajib untuk intervensi BEE, pilihan bagi pihak lainnya).   |
| Input |  Analisa pendahuluan tentang kinerja intervensi secara keseluruhan.  Analisa pendahuluan tentang kinerja sub-sektor secara keseluruhan.  Review GSD  Menghitung dampak-dampak yang terjadi di sub-sektor.  |
| Agenda |  Menilai hasil-hasil yang diperoleh secara keseluruhan oleh sub-sektor sampai saat ini?  Apa saja yang berjalan dengan baik atau tidak baik? Dan mengapa?  Apa saja tantangan dan perubahan kunci di bidang politik, ekonomi dan social yang akan mempengaruhi sub-sektor dan intervensi-intervensi yang dilakukannya?  Apa saja lessons learned kunci yang diperoleh?  Apa yang perlu disesuaikan dalam sub-sektor?  |
| Keputusan kunci |  Melanjutkan, menghentikan atau menambah intervensi baru ke dalam sub-sektor?  Saran-saran tentang perubahan terhadap strategi pertumbuhan sub-sektor.  Potensi untuk melanjutkan kerja dalam sub-sektor.  |
| Output yang diharapkan |  Memperbaharui dokumen pemantauan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipe | Pertemuan Review Komoditas akhir tahun Kedua |  |
| Lama Waktu Review | 2-3 hari |  |
| Peserta | Dipimpin oleh |  |
|  | Peserta |  Koordinator Sektor, Manajer Sektor, Manajer BEE, HBEE, HoSP, RMM (pilihan), Penasehat Senior (pilihan), Ketua Tim/Team Leader (pilihan)  |
| Input |  Presentasi dari Koordinator POKJA APP Kabupateno Kinerja Komoditas dan intervensi-nya. o Revisi-revisi yang disarankan untuk GSD / dokumen strategis Komoditas sub-sektor. o Ruang lingkup potensial untuk melanjutkan kerja di sub-sektor.  Memperbaharui program secara keseluruhan, dampak-dampak yang diproyeksikan dan yang aktual.  Analisa komparatif terhadap semua komoditas.  |
| Agenda |  Menilai kinerja portfolio secara keseluruhan (misalnya sub-sektor dan komoditas).  Dengan portfolio sub-sektor dan intervensi yang ada saat ini, dapatkah PRISMA memenuhi target-target akhir program?  Apa saja tantangan dan perubahan kunci di bidang politik, ekonomi dan social yang akan mempengaruhi sub-sektor dan intervensi-intervensi yang dilakukannya?  Apa saja lessons learned kunci yang diperoleh dari program?  Apa saja yang perlu disesuaikan dalam portfolio sub-sektor yang ada saat ini?  Apa arti perubahan-perubahan potensial ini bagi rencana tahunan?  |
| Keputusan kunci |  Lanjutkan, hentikan atau tambahkan intervensi-intervensi baru dalam sub-sektor.  Saran-saran perubahan untuk strategi pertumbuhan sub-sektor.  Potensi melanjutkan pekerjaan dalam sub-sektor.  Lanjutkan, hentikan atau tambahkan sub-sektor baru ke dalam portfolio.  |
| Output yang diharapkan |  Memperbaharui GSD  Notulen pertemuan tahunan sektor dan review portfolio.  |

****

**OFFTAKER**

**POKMAS/ PRODUSEN LAINNYA**

**BUMDES/KOPERASI**

**PEMERINTAH DESA**

POKMAS/ PETANI : Survey

BUMDEs/Koperasi : Wawancara dan Catatan Usaha

Offtaker : Wawancara dan Catatan Usaha

Indikator pengukuran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tema | Penjelasan | Indikator |
| 1. Tenaga Kerja
 | Akses pada kesempatan kerja yang layak (kuantitas dan kualitas) | Jumlahpekerja, jumlahsupplier, jam kerja |
| 1. Kinerja Usaha
 | Kinerja bisnis secara keseluruhan untuk petani(supplier), BUMDes, maupun off-takers | Jumlahproduksi, pesanan, pasar utama, hargajual, produktivitas, aset, keuntungan |
| 1. Pendapatan dan Konsumsi
 | Perubahan jumlah dan alokasi pendapatan serta konsumsi | Jumlah pendapatan, proporsi pendapatan dalam Rumah Tangga dari berbagai sumber, alokasi belanja Rumah Tangga(% konsumsi makanan, pendidikan dan kesehatan, transportasi/komunikasi, keperluan rumah, transfer, lainnya) |
| 1. Peluang Ekonomi
 | Dampak penciptaan peluang ekonomi lokal | Migrasi masuk dan keluar di rumah tangga |
| 1. Akses Jaringan dan Partisipasi
 | Dampak terhadap perluasan akses, jaringan dan partisipasi | Pendidikan/ pelatihan usaha, penggunaan telepon genggam, kepemilikan produk keuangan(tabungan/pinjaman), penyelenggaraan fora berbagipengetahuan, akses terhadap bantuan sosial(BPJS TK, Kesehatan, bansoslainnya) |
| 1. Persepsi dampak
 | Persepsi dampak dari stakeholder | Persepsi peningkatan pendapatan, pengetahuan, kemampuan, keuntungan, dampak sosial lainnya |

**Tenaga Kerja**

|  |  |
| --- | --- |
| Sumber Data | Indikator  |
| POKMAS dan Produsen Lainnya | * Kegiatan utama dalam seminggu terakhir
* Bidang pekerjaan utama
* Status kedudukan dalam pekerjaan utama
* Jenis pekerjaan / jabatan dalam pekerjaan utama
* Jumlah jam kerja per hari
* Jumlah pekerja yang terlibat proses produksi(data pilah gender dan disabilitas)
 |
| BUMDES/KOPERASI | Jumlah petani /produsen yang tergabung/menjadi supplier keBUMDes/Koperasi (data pilah gender) |
| Off Taker | * Jumlah JumlahJumlah petanipetanipetanipetani petani/produsenprodusenprodusen produsen yang yang yang menjualmenjual menjual menjual hasilhasil produksiproduksiproduksi produksiproduksi ke off -takers (data pilah gender dan disabilitas)
 |
|  |  |

**Kinerja Usaha**

|  |  |
| --- | --- |
| Sumber Data | Indikator  |
| POKMAS dan Produsen Lainnya | * Jumlah produksi dalam satu bulan terakhir (unit dan Rp)
* Jumlah produk yang dijual dalam dalamdalam satu bulan terakhir (unit dan IDR)
* Jumlah pesanan dalam satu bulan terakhir
* Pembelian berulang dalam satu terakhir
* Pasar utama
* Harga HargaHargaHargajual produk produk
* Waktu produksi dalam satu bulan bulan terakhir
* Produktivitas per pekerja dan dan satuan waktu)
* aset (produksi dan non produksi)
 |
| BUMDES/KOPERASI | * Harga Beli Produk
* Jumlah Produk yang dibeli
 |
| Off Taker | * Harga Beli Produk
* Jumlah Produk yang dibeli
 |
|  |  |

**Pendapatan dan konsumsi**

|  |  |
| --- | --- |
| Sumber Data | Indikator  |
| POKMAS dan Produsen Lainnya | * Proporsi pendapatan dari pekerjaan ini dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan individu
* Proporsi pendapatan dari pekerjaan ini dibandingkan dengan keseluruhan pendapatan di rumah tangga
* Alokasi belanja dalam rumah tangga dalam 1 bulan terakhir (konsumsimakanan, pendidikan dan kesehatan, transportasi dan komunikasi, keperluan rumah, transfer, lainnya)
 |

**Peluang ekonomi**

|  |  |
| --- | --- |
| Sumber Data | Indikator  |
| POKMAS dan Produsen Lainnya | * Migasi masuk dan keluar rumah tangga
 |

**Akses Jaringan dan Partisipasi**

|  |  |
| --- | --- |
| Sumber Data | Indikator  |
| POKMAS dan Produsen Lainnya | * Mendapatkan pendidikan/pelatihan terkait dengan usaha
* Jumlah pendidikan/pelatihan
* Pemberi pelatihan
* Memberikan pendidikan/pelatihan terkait usaha (dengan permintaan dan/atau inisiatif)
* Target pendidikan/pelatihan
* Menggunakan telepon genggam dan/atau akses internet untuk keperluan usaha
* Kepemilikan produk keuangan (giro, tabungan, pinjaman, deposito) di lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir
* Menggunakanlayanankeuangandi
 |
| BUMDES/KOPERASI | * Menggunakan telepon genggam dan/atau akses internet untuk keperluan usaha
* Menggunakan layanan keuangan di lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir untuk kegiatan usaha
 |
| Offtaker | * Menggunakanlayanankeuangandi lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir untuk kegiatan usaha
 |
|  |  |

**Persepsi dampak**

|  |  |
| --- | --- |
| Sumber Data | Indikator  |
| POKMAS dan Produsen Lainnya | * Peningkatanpendapatan
* Peningkatanpengetahuan
* Peningkatankemampuan
 |
| BUMDES/KOPERASI | * Keuntungan
* Dampaksosial
* Investasiuntukkeperantaraan
 |
| Offtaker | * Menggunakanlayanankeuangandi lembaga keuangan formal (bank) dalam enam bulan terakhir untuk kegiatan usaha
 |
|  |  |

1. Buku Panduan Keperantaraan Pasar oleh Kolaborasi dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK) *Australian Government* dan Kementrian PPN/Bappenas tahun 2019. [↑](#footnote-ref-1)